



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 12 November 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang VIP Pimpinan Komisi II DPR RI Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Audiensi terkait penyampaian aspirasi
Ketua Rapat	: <b>Moh. Arwani Thomafi/Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 1 (satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dengan agenda Audiensi terkait penyampaian aspirasi, hari Kamis, 12 November 2020, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Moh. Arwani Thomafi, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dengan agenda Audiensi terkait penyampaian aspirasi, yaitu:

1. Menyampaikan aspirasi tentang Posisi DPRD berdasarkan Perpres No. 33 Tahun 2020 terkait hak protokoler bagi mereka. Berdasarkan Perpres tersebut, anggota DPRD disamakan dengan Eselon 2. Sebagai anggota DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat, Perpres itu dinilai tidak adil dan merugikan mereka.

2. Untuk itu ADKASI meminta hak protokoler dan administrasi keuangan dikembalikan sesuai dengan PP No. 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hak protokoler dan administrasi keuangan anggota DPRD dikembalikan seperti semula dan disesuaikan dengan kemampuan daerah, bukan berdasarkan Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
3. ADKASI memohon kepada Komisi II untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Menteri Dalam Negeri RI.

### **III. CATATAN RAPAT**

Catatan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dengan agenda Audiensi terkait penyampaian aspirasi, yaitu:

Komisi II DPR RI akan meneruskan aspirasi Adkasi kepada Kementerian Dalam Negeri RI.

### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 11.25 WIB.

**Jakarta, 12 November 2020**  
**KETUA RAPAT**

**TTD**

**Moh. Arwani Thomafi**  
**A-467**